

BAB I

PENDAHULUAN

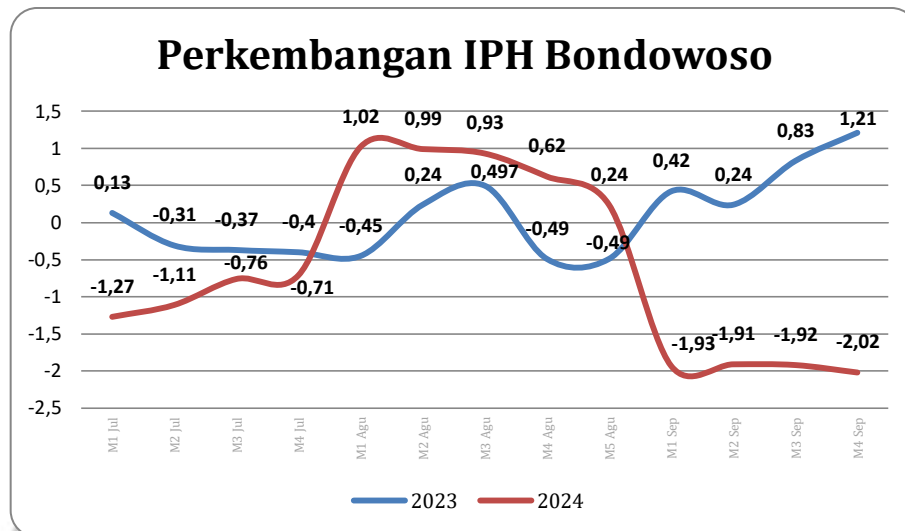
1.1 Latar Belakang

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan (Dye, 2021). Sebagai instrumen fundamental dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik disusun guna merespons permasalahan spesifik, termasuk isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkembang di suatu wilayah. Pada tingkat regional, kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan lokal. Prinsip desentralisasi memberikan otonomi bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Fluktuasi harga komoditas pangan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah, karena berimplikasi langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan bahan pangan sering kali menjadi faktor utama yang memicu dinamika harga yang tidak menentu. Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia mengalami lonjakan permintaan terhadap komoditas pangan. Namun terkadang ketidakmampuan produsen dalam memenuhi permintaan pasar ini mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan laju inflasi (Chintia & Destiningsih, 2022).

Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu daerah yang bergantung pada sektor pangan juga menghadapi tantangan serupa. Pada tahun 2024, fluktuasi harga yang signifikan terjadi terutama pada komoditas seperti beras, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Berdasarkan data Indeks Perubahan Harga (IPH) nilai IPH di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,33%. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang signifikan, dengan puncak tertinggi pada bulan Maret dengan IPH mencapai 4,37%. Hal ini

mencerminkan dinamika harga pangan yang semakin kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 1. Grafik Perkembangan IPH Bulan Juli s/d September Tahun 2023 dan Tahun 2024

Grafik tersebut menggambarkan perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 dan 2024 dengan memperlihatkan fluktuasi harga yang terjadi selama periode Juli hingga September. Pada tahun 2023, nilai IPH relatif stabil dengan beberapa penurunan dan kenaikan moderat. Sebaliknya, pada tahun 2024 fluktuasi IPH menunjukkan dinamika yang lebih signifikan. Hal ini mencerminkan adanya dinamika harga yang lebih fluktuatif pada tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi yang lebih stabil di tahun 2023.

Dinamika fluktuasi harga yang signifikan ini akan berdampak pada ketahanan pangan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mayoritas pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan (Kementerian Pertanian, 2022). Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan stabilisasi harga yang tepat untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi (Nugrahapsari & Hutagaol, 2021). Dalam konteks ini, setiap daerah dituntut untuk mampu menyusun strategi kebijakan yang inovatif dan adaptif agar dapat merespons dinamika pasar secara cepat dan tepat (Haerah, 2024). Mengingat fluktuasi harga komoditas pangan tidak hanya berkontribusi terhadap inflasi, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi serta kesejahteraan

masyarakat, kebijakan stabilisasi harga menjadi instrumen yang krusial dalam menjaga keseimbangan pasar.

Kebijakan stabilisasi harga pangan memiliki tiga manfaat utama yang berkontribusi terhadap keseimbangan ekonomi, yaitu: (1) melindungi petani sebagai produsen dari penurunan harga, sehingga mereka dapat beroperasi lebih efisien; (2) melindungi konsumen kelas menengah ke bawah yang berpendapatan rendah (*poor consumers*) dari gejolak peningkatan harga, sehingga kebijakan ini dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk *social safety net*; dan (3) menciptakan kondisi makroekonomi yang lebih stabil, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi (Rahmanta & Maryunianta, 2020).

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan wujud konkret dari implementasi kebijakan publik di tingkat daerah dalam menjaga stabilitas harga. Keberadaan TPID bertujuan untuk merespons tantangan inflasi yang dipicu oleh fluktuasi harga pangan, sehingga perannya menjadi krusial dalam sistem pengendalian inflasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 500.05-8135 Tahun 2017, TPID memiliki tanggung jawab utama dalam pengumpulan data, perumusan kebijakan, penguatan sistem logistik, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas pengendalian inflasi (Menteri Dalam Negeri, 2017). Di Kabupaten Bondowoso, TPID menjalankan fungsinya melalui koordinasi dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar kebijakan stabilisasi harga pangan dapat diimplementasikan secara optimal.

Implementasi kebijakan pengendalian harga komoditas pangan oleh TPID Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui strategi 4K meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Salah satu program yang dilakukan adalah pemantauan harga secara berkala di pasar-pasar besar maupun pasar tradisional. Selain itu, TPID juga melaksanakan Operasi Pasar di lokasi distribusi untuk menstabilkan harga komoditas strategis. Program-program ini merupakan bagian dari kebijakan stabilisasi harga pangan yang bertujuan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan pasokan. Efektivitas program-program ini akan sangat ditentukan

oleh pengelolaan strategi dan sumber daya yang tepat, termasuk koordinasi antar instansi dan pengawasan implementasi kebijakan (Haerah, 2024).

Kajian yang dilakukan oleh Shelly Vetria (2024) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan seperti operasi pasar, pengendalian distribusi barang, dan pengawasan harga berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Temuan tersebut memperkuat relevansi argumen bahwa program-program seperti operasi pasar dan pengendalian distribusi telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Namun, perbedaan karakteristik dan tantangan yang dihadapi setiap wilayah menjadikan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan program serupa di Kabupaten Bondowoso sangat penting untuk dilakukan.

Meskipun kebijakan stabilisasi harga pangan yang diterapkan oleh TPID Kabupaten Bondowoso telah mencatatkan beberapa capaian positif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Fluktuasi harga pangan yang tetap terjadi meskipun kebijakan telah diterapkan menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan program operasi pasar dan pemantauan harga sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi harga pangan dalam mengendalikan fluktuasi harga yang signifikan di Kabupaten Bondowoso.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam stabilisasi harga komoditas pangan di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 melalui mekanisme operasi pasar dan pemantauan harga?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam stabilisasi harga komoditas pangan di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 dengan fokus pada program operasi pasar dan pemantauan harga.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan manajemen pemerintahan daerah. Analisis efektivitas kebijakan stabilisasi harga pangan yang diterapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat menjadi referensi empiris yang memperkaya kajian tentang tata kelola pemerintahan dalam konteks pengendalian inflasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pengelolaan kebijakan yang lebih efektif di tingkat daerah, sehingga memberikan perspektif baru dalam studi pengelolaan stabilitas ekonomi oleh pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah daerah, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bondowoso, dalam menilai efektivitas kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dalam rangka meningkatkan pengendalian harga pangan di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya yang menghadapi masalah serupa dalam merancang dan melaksanakan kebijakan stabilisasi harga pangan guna memastikan keberhasilan jangka panjang dalam menjaga kestabilan harga pangan dan kesejahteraan masyarakat.